

## PENGUATAN IDEOLOGI DALAM PEMBANGUNAN POLITIK

(Kasus Koalisi Partai Pendukung di Provinsi Jambi)

---

Navarin Karim

navarin234@gmail.com

Citra Darminto

citra\_darminto.yahoo.co.id

### *Abstract*

*Diology since in the reform era almost nothing and seems to die in the political domain. The situation is different from the Old Order and the New Order. Determination of party choice is no longer based on ideology, but is more based on interests. Similarly, in party coalitions support candidates in Pemilukada. Whereas the derivative of Idiology is the principle. If someone is not strong in political ideology, it will be directly proportional to the weakness of a person's principle, someone's dust will be trapped in pragmatism. If the ideology is strong then will be depicted strong vision, mission, and program and jargon candidate in election kada. The public also no doubt choose the candidate, because there is a stigma as if the vision, mission, the program only as political accessories are made as a batman trap for voters. The purpose of this research is to strengthen ideology in political development and identify the stages of political development that need to be improved. Data collection method using primary and secondary data from KPUD, Political Parties in (Sarolangun, Muara Tebo and Jambi) Jambi Province. The analytical method uses qualitative analysis. The results of the study show that almost all candidates in post-conflict local elections are not supported by the coalition of parties with the same ideology and after analyzing the causes in addition to the main causes of too many parties whose ideology is the same and or almost the same.*

*Key word : Diology, Strengthening and Political Development.*

### **PENDAHULUAN**

Ideologi sejak di era reformasi hampir tidak ada dan seolah mati dalam

dalam domain politik. Beda situasinya dengan Orde Lama dan Orde Baru, masyarakat begitu keukeh-nya (baca:

kokoh) memegang ideologi yang telah diyakininya. Pindah dan atau bergabung dengan ideologi lain, secara ekstrim dianggap sebagai orang yang murtad, alias lemah dalam prinsip. Ideologi bukan lagi dianggap agama politik. Bukankah turunan dari suatu ideologi itu adalah “prinsip”. Orang yang lemah dalam memegang teguh ideologinya berarti lemah dalam berprinsip. Apakah ini disebabkan nuansa kehidupan materialis makin menggejala dalam masyarakat. Budaya populer lebih menonjol dalam masyarakat, mereka khawatir tidak kebagian kue kekuasaan, sehingga prinsip “ora edan ora keduman” dianggap suatu yang. Benar-benar masyarakat kita sudah semakin “sableng” demi kepentingan. Orang-orang idealis semakin sulit ditemukan, karena ini dianggap aneh dan sebagai budaya yang tidak populer. Bagaimana tidak, partai dalam berkoalisi tidak lagi memperhatikan rambu-rambu koalisi. Seharusnya dalam berkoalisi aspek ideologi yang dikedepankan, baru kesamaan visi, misi, program dan jargon. Kadang lebih membingungkan lagi visi, misi dan program yang boleh dikatakan hampir tidak ada kesamaan-pun ikut berkoalisi. Anehnya lagi setelah berkoalisipun dalam waktu tidak seumur jagung dapat berpindah atau menyeberang ke koalisi lainnya. Sebagai contoh, ketika pertama Jokowi terpilih jadi Presiden, masih ada Koalisi Indonesia

Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Namun perlahan tapi pasti KMP nyaris tidak terdengar seperti iklan sebuah iklan mobil Panther, yang sekarang benar-benar menghilang dari peredaran. Fenomena koalisi gemuk juga makin menggejala, apalagi orang pindah partai yang berbeda seolah suatu hal yang biasa, walaupun berbeda. Hal yang sangat mencengangkan ada pula seorang putera Jambi yang bernaung dalam partai berbeda dalam periode yang tidak sama. Hebatnya yang bersangkutan benar-benar “mahir” dalam memilih partai yang lagi menggejala (nge-trend) pada periodenya, sehingga ia selalu dapat jabatan politik yang strategis. Kasus lain, dalam satu keluarga ditemukan beda-beda partai suatu hal yang biasa dan tidak pernah dipersoalkan. Padahal ketika Orde Lama dan Orde Baru hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Masak dalam satu rumah beda agama!

Dampak dari matinya ideologi dalam politik dikhawatirkan koalisi gemuk akan terus menggejala, sehingga partai penguasa tidak ada mengontrol lagi. Paling hanya sebagian kecil “watch dog” saja yang berani mengontrol. Jika sudah begini kenyataannya pembangunan politik mengalami kemunduran (decrease), walaupun keran demokrasi sudah dibuka seluas-luasnya oleh mantan Presiden B.J. Habibie. Jika ini terus berlanjut, dikhawatirkan masyarakat

Indonesia akan kehilangan karakternya, karena lebih banyak yang membebek. Bukankah “encourage” merupakan salah satu kriteria orang yang berkarakter dalam mengemukakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kekhawatiran lainnya, bagi pemilih kategori skeptis akan melakukan gerakan tidak memilih (golput), karena mereka khawatir kompromi politik tanpa didasari ideologi akan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, yang makin menguat adalah pemerataan distribusi dan alokasi kepada partai koalisi, maka mata rantai korupsi-pun akan sulit diputuskan. Berdasarkan pengamatan sepintas dari penulis menemukan fakta dalam pemilu pada serentak di Provinsi Jambi tahun 2017 : hampir seluruh kandidat dalam pemilu pada serentak di provinsi Jambi didukung oleh koalisi partai yang tidak mempunyai kesamaan ideologi, visi, misi, program dan jargon.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pentingnya Ideologi**

Ideologi melingkupi semua sistem nilai, keyakinan, simbol, mitos, ritual, dan jargon yang terdapat dalam suatu struktur sosial masyarakat. Dalam dunia politik, hubungan antara ideologi dan politik adalah hubungan yang tak terpisahkan (inseparabile) (Seliger, 1976).

Disini diartikan bahwa partai politik menyiratkan suatu cara berpikir yang mewarnai dan memengaruhi cara sikap dan berperilaku yang diperlihatkan orang-orang dalam suatu kelompok sosial.

Firmansyah (2008) : mengusulkan agar ideologi digunakan untuk persaingan politik. Dengan demikian masing-masing partai politik akan mengusung ideologi yang berbeda satu dengan lain. Dalam hal ini ideologi dapat berupa metode dan tujuan akhir ingin diperjuangkan oleh partai politik. Ideologi sosialis memiliki tujuan yang berbeda dengan ideologi kapitalis. Tujuan yang ingin dicapai oleh ideologi sosialis adalah masyarakat dengan kesejahteraan merata. Sebaliknya ideologi kapitalis ingin menciptakan kemakmuran dan kekayaan yang sebesar-besarnya. Ideologi agama, lebih mengedepankan pencapaian masyarakat madani, dengan memperkenalkan konsep-konsep ekonomi syariah. Selain itu, cara pencapaian yang dipakai ketiganya secara significant sangat berbeda. Ideologi sosialis lebih menekan aspek pemerataan dan intervensi Negara. Sementara ideologi kapitalis lebih menekankan kebebasan dan non intervensi negara terhadap aktivitas ekonomi. Sementara ideologi Islam, lebih mengedepankan cara-cara penyelenggaraan ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Gidengil et al (1999)

berargumen bahwa dalam banyak hal, struktur ideologi pemilih sangat menentukan partai apa dan kontestan seperti apa yang menurut mereka akan menyuarakan suara mereka. Dalam studinya, Nevitte et al, (2000) menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menjamin keberlangsungan sistem multipartai adalah terdapatnya beragam dan bewarna-warni sistem nilai serta keyakinan pada kelompok-kelompok pemilih. Fenomena kedekatan ideologi antara pemilih dengan partai politik atau seorang kontestan individual juga bisa dijelaskan dengan menggunakan model 'spatial'. Downs (1957). Dalam model ini, para pemilih diasumsikan sebagai 'risk averse' dan mereka memiliki sistem nilai serta keyakinan yang sudah tertanam. Mereka memiliki kecenderungan untuk memilih partai atau kontestan yang memiliki kesamaan dengan ideologi mereka, daripada partai politik atau kontestan yang memiliki ideologi berbeda. Beberapa cara dapat digunakan partai politik dalam hal ini, diantaranya : Pertama, partai politik berusaha menarik masyarakat yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka. Kedua, partai politik berusaha memperkenalkan dan meyakinkan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki kesamaan ideologi dengan mereka. Studi yang dilakukan terhadap sistem kompetisi partai politik di Kanada dalam

pemilihan nasional 1997 dan 2000, Scotto et al, (2004) menyimpulkan sangat pentingnya peranan ideologi dalam memengaruhi pemilih. Semasa kampanye pemilu, partai politik biasanya mengoptimalkan kedekatan ideologi dengan partisannya (Rochchneider, 2002). Hal ini memiliki dua efek komunikasi atas identitas ideologi partai : (1) memperkuat identitas massa melalui ritual politik simbolik seperti rapat akbar, dan (2) memperluas identitas ideologi partai ke massa mengambang dan partisan lain, melalui efek komunikasi rapat akbar dan liputan media. Hal ini akan mempermudah pemilih untuk mengidentifikasi ideologi suatu partai sekaligus mengundang perhatian partisan partai lain. Ideologi politik perlu dilihat lebih serius lagi dan termanifestasikan pada hal-hal yang bersifat riil. Persoalan yang dihadapi masyarakat perlu dicarikan jalan pemecahannya. Lantas apa yang membedakan suatu solusi dengan solusi lain? Partai politik perlu menggunakan ideologi politik masing-masing untuk mengajukan isu dan program politik. Dengan kata lain, ideologi politik harus menjiwai cara partai politik dalam memikirkan semua permasalahan bangsa dan negara.

Perlu dicatat, bahwa di Indonesia terdapat banyak partai politik yang sesungguhnya memiliki ideologi sama, misalnya kelompok nasionalis seperti yang

diwakili partai-partai besar PDIP, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Gerindra dan Golkar. Sedang partai yang bernafaskan Islam terutama diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera PPP. Partai-partai Islam lain seperti PKB dan PAN sesungguhnya terletak diantara kedua ideologi itu. Kedua partai terakhir ini mengklaim sebagai partai nasionalis, tapi basis mereka adalah ormas Islam terbesar di Indonesia yakni PKB berbasis NU dan PAN berbasis Muhammadiyah. Gejala di Indonesia ini mungkin menarik disimak. Dari banyaknya jumlah partai dengan ideologi yang sesungguhnya tidak jauh berbeda, lalu apakah yang mendorong berdirinya begitu banyak partai? Tentu saja harus diakui pada zaman now mendirikan partai tidak semata dilandaskan ideologi tertentu. Sebagai contoh besarnya adalah AS. Di negara Paman Sam ini hanya ada dua partai. Keduanya secara tegas mendefinisikan ideologi partai yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga memudahkan bagi masyarakat menentukan partai politik yang didukung.

### **B. Ideologi dan Semen Politik**

Firmansyah (2008) kemukakan ideologi adalah semen politik baik bagi individu di dalam maupun di luar organisasi politik partai politik. Berpolitik hanya akan mendapatkan legitimasi apabila ide, gagasan dan aktivitas fisik mendapat dukungan

sebanyak mungkin orang. Untuk dapat mengikat individu-individu yang memiliki latar belakang saling berlainan, organisasi partai politik membutuhkan basis ideologi yang jelas. Apalagi umumnya partai politik umumnya sangat menginginkan pengikut dan pemilihnya yang menjadi loyal dan hanya menjadi pengikut yang periodik. Dengan demikian, pemilih, perlu diikat dan dihubungkan dengan ide dan gagasan besar politik yang menjadi basis perjuangan masing-masing partai. Ini tidak akan terwujud jika partai politik tidak memiliki basis ideologi yang jelas dan dituangkan dalam bentuk pernyataan politik.

Ideologi politik juga dapat berperan sebagai '*interface*' di level internal dan terlebih di tingkat 'eksternal'. *Interface* ini juga dapat berfungsi sebagai pemersatu. Seperti yang telah diungkapkan di awal bahasan, organisasi politik tersusun oleh beragam individu dan kelompok, dimana masing-masing memiliki agenda dan tujuan politik yang sangat mungkin berbeda. Sementara itu, sebagai kolektivitas organisasi politik, partai membutuhkan kesatuan ide dan aktivitas. Sebagai konsekuensinya, partai politik membutuhkan konsep dasar-dasar yang dapat mempersatukan beragam kepentingan dan tujuan politik itu dalam suatu *platform* partai. Hasilnya, satu dengan yang lain akan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan

ideologis bersama. Sudah dapat dibayangkan betapa tanpa basis ideologi yang jelas, partai politik akan sangat rentan terhadap perpecahan. Soalnya, kepentingan individu dan kelompok memang kerap kali dianggap lebih daripada tujuan dasar bersama.

### C. Ideologi dan Komunikasi Politik

Ideologi Politik yang jelas juga memudahkan dalam komunikasi politik. Berkomunikasi melibatkan lebih dari dua pihak. Ada pihak yang mengirimkan pesan dan ada pula yang menerima pesan itu. Masing-masing pihak berkesempatan untuk memberi sinyal satu sama lain. Pihak yang mengirim pesan berusaha mengirimkan sinyal mengenai maksud dan isi pesannya, sementara pihak dalam bentuk interpretasi atas pesan-pesan yang diterima. Dalam perjalanan pesannya – dari pengirim ke penerima – banyak sekaligangguan (*noise*) yang dapat menjauhkan atau menyimpangkan maksud dan isi pesan bersangkutan. Sementara itu, si penerima pesan juga memiliki skema interpretasi (*interpretative scheme*) mereka sendiri, sehingga dapat saja mengartikan secara berbeda sinyal-sinyal yang mereka terima. Akibatnya, proses komunikasi menjadi sangat kompleks dan rentan penyimpangan (*deviation*) pesan. Apalagi dalam dunia politik, di medan ini, peranan media dan pers sangat penting sebagai

corong (*transmitter*) pesan politik. Disamping itu, pesan politik pun seringkali harus melewati beberapa perantara, sehingga sangat mungkin timbul bias informasi.

Ideologi politik yang kuat akan membantu para penerima pesan dalam mengartikan pesan-pesan yang tersebar melalui berbagai sumber. Acapkali penerima pesan perlu membangun basis pemahaman atas pesan yang diterima itu secara parsial, atau tidak utuh. Ketika si penerima tidak memiliki pengetahuan (*knowledge*) tentang latar belakang dan karakteristik si pengirim pesan. Kejelasan ideologinya akan dapat membantu si penerima pesan untuk membangun pemahaman atas maksud dan tujuan si pengirim dengan menggunakan beberapa sinyal yang tidak jelas pun. Sebagai contohnya dalam kehidupan politik sehari-hari di Indonesia pada masa Orde Baru, ketika pucuk pimpinan mengungkapkan pesan tersamar, seperti, “Tindakan seperti itu tidak pantas”, masyarakat langsung bisa memahami maksudnya, yakni bahwa melakukan tindakan seperti itu bisa berakibat sangat fatal. Soalnya, Orde Baru menganut ideologi yang jelas dan bila perlu dipaksakan dengan kekerasan. Tidak berarti yang dilakukan Orde Baru itu benar.

#### **D. Lawan Ideologi**

Dewasa ini dunia politik – termasuk di Indonesia – diwarnai pekat oleh suatu kecenderungan baru, yaitu orientasi yang berlebihan terhadap “kekuasaan”. Seolah kekuasaan adalah tujuan akhir yang harus dicapai para politikus. Memang harus diakui bahwa “kekuasaan” penting dalam berpolitik. Insentif terbesar dalam berpolitik adalah mendapatkan kekuasaan.

Dengan berkuasa, seseorang atau suatu kelompok akan dapat melakukan banyak hal yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kekuasaan, seperti aktivitas pemerintah, membuat peraturan, menggerakkan polisi dan militer, mewakili kepentingan bangsa negara sampai mendapatkan hak-hak privilege seperti pengawalan dan prestise di masyarakat. Namun seringkali dilupakan bahwa “kekuasaan tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Kekuasaan pasti disertai dengan tanggung jawab (responsibility). Apalagi dalam ranah politik. Untuk mendapatkan kekuasaanm partai atau aktor politik perlu menyebarkan janji dan harapan politik selama kampanye pemilu. Tidak mengherankan jika banyak sekali tanggung jawab untuk memenuhi janji-janji dan harapan itu.

Keinginan untuk berkuasa sedemikian besar, sehingga melupakan esensi ‘tanggung jawab’ yang menyertai

setelah mendapatkan kekuasaan. Seolah-olah setelah mendapatkan kekuasaan, atau keluar sebagai pemenang pemilu, semua persoalan terselesaikan, padahal justru masalah besar segera hadir setelah menang, yaitu membuat kekuasaan yang dimiliki bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, bukannya memanjakan kepentingan partai atau sekelompok dan individu-individu tertentu. Menjadi pemimpin – baik yang bersifat lokal maupun nasional – berarti menjadi pemimpin bagi semua elemen dan unsur penusun yang ada di masyarakat. Sementara individu, kelompok atau partai politik hanyalah sebagian kecil dari elemen penyusun itu. Jadi, tanggung jawab yang menjadi beban ketika berkuasa adalah melakukan upaya untuk bisa berdiri seimbang di antara semua kelompok dan menjembatani kepentingan-kepentingan bersama.

Kalau mau dikatakan salah, inilah kesalahan yang dilakukan pada masa Orde Baru. Janji ditebarkan seenaknya sendiri, padahal harapan masyarakat tidak pernah terpenuhi. Penyakit ini tampaknya masih berjalan hingga kini. Para kandidat dan partai-partai rajin berjanji, padahal banyak diantaranya yang sebenarnya tidak asuk akal dan tak mungkin terpenuhi. Seperti yang terungkap dala syair sebuah lagu pop, ‘tapi janji tinggal janji.’ Pertanyaan mendasar dalam hal ini adalah apakah yang

membedakan antara politik dengan politik lainnya? Seperti masing-masing calon dan partai politik perlu memposisikan, hal-hal yang akan disampaikan kepada masyarakat – bahkan janji politik politik pun. Janji politik tidak sekedar janji, tapi perlu berlandaskan pada suatu garis ideologi tertentu. Tanpa ideologi yang jelas hanya akan membuat janji politik lebih bersifat administrasi dan teknis peecahan persoalan yang dihadapi belaka.

### **E. Pragmatisme**

Semangat pragmatisme membuat dunia politik semakin menjauh dari wacana ideologi. Menyadari bahwa ideologi sulit sekali dicerna dan diimplementasikan membuat politikus hanya berkutat dengan hal-hal yang bersifat riil. Ditambah lagi kenyataan tentang betapa mudahnya mereka terjebak pada pemahan semu mengaitkan antra ideologi dengan sifat fanatik dan otoriter. Lebih lanjut lagi, semakin tingginya tekanan persaingan politik membuat para politikus lebih berorientasi pada cara-cara untuk memenangkan pemilu semata. Sangat masuk akal apabila suhu dan tekanan aktivitas politik semakin meningkat menjelang kampanye pemilihan pun sudah banyak sekali individu atau partai politik mengambil ancang-ancang untuk mencalonkan diri. Sementara itu, permasalahan rakyat dan nasional jarang sekali dibahas dan diselesaikan. Semua

usaha dan sumber daya difokuskan pada upaya untuk memenangkan para calonnya.

Hal ini tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya tepat. Hanya kau politisi tidak akan mampu menyentuh permasalahan rakyat sebagaimana mestinya. Selain itu, para politisi juga akan semakin kehilangan rasionalitas program kerja dan isu politik mereka sendiri. Padahal program kerja dan isu politik disusun berdasarkan semangat dan impian indah atas kondisi masyarakat yang ingin dibentuk – yang kemudian dituangkan dalam program dan isu politik. Tanpa ini, mudah sekali politisi dan partai politik terjerumus ke dalam semangat pragmatis. Masyarakat tidak pernah disuguhi diskusi dan perdebatan ideologis, sehingga ideologipun menjadi semakin langka dan bisa dikatakan hilang dari pandangan masyarakat. Pragmatisme yang berlebihan terkadang semakin mengaburkan ideologi partai itu sendiri. Bahkan, dalam berkoalispun ada partai yang melakukannya dengan partai politik lain yang jelas-jelas memiliki basis ideologi berseberangan. Seolah-olah cara ini sah saja dilakukan asalkan bisa menjamin kemenangan partai politiknya.

### **F. Rambu-Rambu Koalisi**

Jokowi tahun 2014 pernah kemukakan rambu-rambu koalisi sebagai berikut :

1. Tutup pintu koalisi



PDI Perjuangan mempertimbangkan untuk melakukan koalisi dengan partai lain. Terutama dengan partai-partai yang mengharapkan untuk mendapatkan jatah kursi menjadi menteri. Sebab, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo menegaskan tidak akan membagi-bagikan jatah kursi menteri kepada partai lain jika terpilih nanti. Jokowi mengungkapkan, ingin membentuk pemerintahan yang dilandasi ideologi yang kuat. Karenanya, dalam hal berkoalisi, Jokowi akan sangat selektif dalam memilih rekan. Dan tidak akan menerima tawaran koalisi yang memaksakan untuk mendapatkan jatah menteri. "Tidak ada yang namanya nego-negoan dan lobi-lobi, dalam artian pakai duit. Tidak ada yang namanya bagi-bagi kursi menteri," tegas Jokowi saat menjumpai pendukung di Kota Malang Jawa Timur.. Jokowi menegaskan, bukan berarti partainya tidak membuka pintu koalisi. Karena tetap bisa sebuah koalisi pemerintahan yang kuat.

## 2. Tidak ada tawar menawar

Kerja keras bersama para simpatisan dan kader PDI Perjuangan, partainya akan memiliki pondasi yang kuat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Kalau punya parlemen dan presiden kuat, berjalannya itu enak. Kita ingin kuat karena kita tidak pengen transaksi. Dikit-dikit negosiasi. Kita tidak ingin koalisi saling

sandera dan tawar menawar," tegasnya. Dalam kampanye terbuka itu hadir pula Sekjen PDI P Tjahjo Kumolo, Dai Bahtiar, dan Ketua DPD Jawa Timur.

## 3. Harapkan partai Islam

Jokowi mengharapkan, dengan pertemuan ini koalisi antara PDI Perjuangan dengan partai Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan, ia pernah melakukan pertemuan dengan organisasi Islam, Muhammadiyah. Pertemuan serupa sudah dilakukan Jokowi beberapa kali. Namun ia enggan untuk menunjukkan kunjungannya itu secara terbuka.

## 4. Koalisi dengan rakyat

Ketika masih menjadi Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, lebih memilih berkoalisi dengan rakyat ketimbang tokoh nasional. Oleh karena itu ia memilih mendeklarasikan pencapresannya dilakukan sederhana di rumah Si Pitung, Marunda, Jakarta Timur. "Di deklarasi saya tidak ada tokoh besar, hanya di rumah Si Pitung dengan bendera merah putih. Itu artinya karena koalisi kita dengan rakyat bukan dengan siapa-siapa, karena yang pilih adalah rakyat," ujarnya di hadapan Paguyuban Timbul Sehati di Rumah Makan Lembur Puring, Kampung Legos, Cicurug, Sukabumi. Keinginan Jokowi berkoalisi dengan rakyat mengingatkan kita pada

Koalisi Kerakyatan pada pemilu 2004. Dimana Koalisi Kerakyatan menjadi ujung tombak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tujuannya? melawan Koalisi Kebangsaan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.

#### 5. Perjuangan terbuka untuk semua partai

Ketika masih sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karena PDI Perjuangan tidak menutup pintu koalisi dengan siapapun. "Ya semuanya bisa saja, PDI Perjuangan terbuka untuk semua partai," jelasnya di Balaikota DKI Jakarta.

Dari kelima rambu koalisi yang dikemukakan Jokowi ketika masih menjadi bakal calon Presiden tersirat sangat pragmatis dan menunjukkan ketidakkonsistenan dalam ideologi.

### **G. Ideologi di Era Ketidakpastian**

Kita hidup pada suatu era di mana akses ketersediaan informasi sangat tinggi. Berbeda dengan beberapa dekade yang lalu, sumber dan jenis informasi tersedia dengan melimpah ruah, sampai-sampai sulit mengurai satu persatu informasi yang kita terima. Informasi tidak hanya beragam, tetapi juga saling berkontradiksi antara satu dengan lainnya. Akibatnya, ketidakpastian tidak lagi disebabkan oleh kurangnya informasi (lack of information) melainkan lebih karena membludaknya information

overload). Dalam dunia politik juga sama saja. Rona ketidakpastian sangat menguasai. Setiap pihak berusaha menjustifikasi bahwa yang mereka lakukanlah yang paling benar adanya. Yang tertinggal adalah para individu yang mau tidak mau harus berusaha mencerna sendiri informasi yang mereka terima. Lantas, cara masing-masing individu dalam menganalisis platform partai, kebijakan partai atas su tertentu menjadi suatu yang sangat penting. Karena, kalau tidak, yang terjadi hanyalah terciptanya manusia apatis dan tidak peduli terhadap dunia politik. Soalnya begitu sulit mencerna dan menyusuri kebenaran masing-masing informasi yang mereka terima.

Firmansyah (2008) menanggapi hal ini dengan mengemukakan bahwa : masyarakat membutuhkan penanda yang memudahkan mereka untuk mengidentifikasi tiap-tiap informasi. Penanda juga membantu pemilih dalam menentukan partai politik mana yang akan mereka pilih. Penanda ini tidak hanya bersifat sementara dan sektoral, melainkan holistik dan melingkupi identitas politik secara keseluruhan. Penanda yang sangat berguna dalam politik adalah ideologi, karena sifatnya yang holistik dan tidak parsial. Ideologi politik dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi keaslian informasi yang mereka terima. Dalam menentukan konsistensi isi informasi,

mereka mengaitkannya dengan gambaran (image) tentang ideologi politiknya, sebagai basis perjuangan suatu partai politik. Jadi, ideologi politi sangat membantu para pemilih dalam menentukan pilihan mereka diantara partai-partai, terutama untuk situasi seperti Indonesia yang menganut banyak partai. Partai politik yang mampu menanamkan ideologinya di benak masing-masing pemilih niscaya dapat menarik keuntungan dengan mudahnya para pemilih dalam mengingat dan mengidentifikasinya. Hal ini sekaligus mengurangi situasi ketidakpastian yang mungkin saja menghantui para pemilih.

#### **H. Pembangunan Politik**

“Pembangunan” didefinisikan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (national building) (Siagian : 2005, p. 3).

Penulis berpendapat bahwa dalam suatu negara berkembang ada tiga tahap penting yang perlu dilalui dalam pertumbuhan dan perkembangan politik dalam rangka pembangunan nasional.

Pertama, menciptakan stabilitas politik, namun tidak boleh dijadikan sebagai tujuan pembangunan di bidang politik. Dalam pada itu stabilitas politik pada fase pertama mutlak diperlukan sebagai landasan

yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Stabilitas politik tidak boleh dijadikan tujuan oleh karena apabila mereka yang terlibat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan politik itu berorientasi semata kepada stabilitas politik itu sehingga stabilitas itu dijadikan tujuan, maka dapat dikatakan bahwa mereka itu berorientasi kepada status quo politik. Meskipun demikian kiranya tidak salah apabila ditekankan sekali lagi bahwa stabilitas politik itu memang merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) sebagai tahap awal dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan di bidang politik.

Kedua, penyusunan kembali struktur-struktur politik organisasi politik. Oleh karenanya telah kita catat bahwa jumlah partai-partai politik terlalu berlebihan dapat mengakibatkan perbedaan semakin beragam dan membingungkan dust potensi konflik juga akan semakin besar, maka jumlah partai yang ada perlu disederhanakan untuk memperkokoh stabilitas politik. Hanya untuk melakukan fusi serahkan kepada partai-partai politik itu sendiri dengan bimbingan, motivasi dan pengarahan dari pihak yang kompeten dan independent.

Ketiga, *Political take off*. Yang dimaksud dengan istilah ini ialah dimulainya usaha-usaha oleh partai politik

yang telah disederhanakan dan dimatangkan itu untuk turut serta secara aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang mereka sendiri yaitu bidang politik, seperti peningkatan kualitas calon atau kandidat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta pencerdasan pemilih. Sudah jelas bahwa peranan partai politik dalam proses pembangunan nasional sangat penting bahkan sangat menentukan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ma. Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kota Jambi. Dipilihnya dua Kabupaten dan kota sebagai tempat penelitian dianggap representasi dari Jambi.

### **B. Tipe Penelitian**

Untuk memperoleh data yang akurat dan untuk mengadakan pendekatan objek dan sasaran penelitian, serta untuk menjamin adanya data yang tepat, dan arah tujuan yang diharapkan harus didukung oleh penggunaan metode penelitian yang tepat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong. Dikutip dari Bag dan Taylor, bahwa “metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif ini mengetahui makna (*Meaning*) suatu fenomena menurut si pelakunya sendiri. Melalui pendekatan fenomenologis peneliti melihat fenomena yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman pada suatu peristiwa yang terjadi. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara dan observasi yang mendalam dengan para pelaku yang ada di lokasi penelitian.

### **C. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat empiris (penelitian lapangan) dimana peneliti menggali informasi dilapangan secara langsung menemui pejabat dan masyarakat yang terkait dalam penelitian ini.

### **D. Teknik Pengambilan Data/Bahan**

Yaitu merupakan salah satu bentuk penelitian dengan cara ke lapangan yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek yang diteliti

b. Wawancara/interview

Melakukan wawancara secara langsung dilapangan dengan informan

c. Dokumentasi

Melakukan pengambilan data dengan mencari dan menyalin data mengenai objek yang dijadikan penelitian dari literatur dan sumber-sumber data sekunder yang lain. Dimana data sekunder ini dapat dijadikan pelengkap dari data primer atau memperoleh data dengan mempelajari dokumentasi yang erat kaitannya dengan penelitian dari instansi yang terkait.

d. Teknik Triangulasi

Disamping meneliti terhadap Bupati dan wakil Bupati terpilih, penulis melakukan cross chek terhadap beberapa pimpinan partai yang berkoalisi dan tim sukses, KPUD sehingga objektifitas penelitian dapat lebih dimunculkan.

**E. Klasifikasi Data/Bahan**

a. Data Primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya, dalam hal ini dengan Bupati dan wakil bupati terpilih, pimpinan partai yang berkoalisi dan tim sukses

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perorangan atau lembaga yang memiliki informasi data lengkap tentang objek yang sedang diteliti, seperti data jumlah penduduk dan sejarah perkembangan kecamatan, data ini berupa dokumen-dokumen.

**F. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pengolahan data yang dilakukan secara induktif, yaitu peneliti akan berusaha mengumpulkan fakta-fakta dari fenomena atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Kabupaten Sarolangun**

Pemilu kada serentak 2017 di kabupaten Sarolangun terdapat dua pasangan kandidat yang bertarung yaitu pasangan Drs. H. Muhammad Madel/Muharsyah berhadapan dengan petahana Drs. H. Cik Endra/H. Hilalatil Badri. Drs. H. M. Madel/Muharsyah didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrat (PD). Sedangkan Drs. H. Cik Endra/Hilalatil Badri didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Amanah Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jika dilihat dari ideologi kepartaian, partai yang mengusung Drs. H.M. Madel/Muharsyah satu ideologi agama (PKS), dan dua ideologi Nasionalis (PD dan Hanura). Sedangkan Drs. H. Cik Endra/Hilalatil Badri di dukung oleh tiga partai Nasionalis

(Golkar, PDI P dan Nasdem), satu partai ideologi agama (PPP) dan satu partai ideologi Nasionalis agama (PAN). Kedua kandidat tidak mementingkan kesamaan ideologi. Seharusnya pasangan Drs. H. Cik Endra.Hilalatil Badri cukup didukung oleh tiga partai yang sama ideologi partai yaitu PDI P, Golkar dan Nasdem, karena sudah memenuhi syarat electoral treshold. Namun karena kurang rasa percaya diri mereka tambah satu partai ideologi agama (PPP) dan partai dengan ideologi Nasionalis agama (PAN).. Akibatnya mereka terjebak pada koalisi gemuk dan tidak seragam lagi ideologinya. Sementara pasangan Madel/Muharsyah karena dua dua ideologi nasional (partai Demokrat dan Hanura) saja belum memenuhi elektoral treshold, maka menambah satu ideologi agama yaitu PKS.

## **B. Kabupaten Muara Tebo**

Pemilu kada serentak 2017 di kabupaten Muara Tebo terdapat dua pasangan kandidat yang bertarung yaitu pasangan Hamdi, S.Sos, M.M/Harmain berhadapan dengan petahana Sukandar, S.Kom, ME/Syahlan . Sukandar/Syahlan didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerindra, PDI Perjuangan dan Perindo. Sedangkan Hamdi/Harmain didukung oleh Partai Demokrat (PD), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang

(PBB) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).. Jika dilihat dari ideologi kepartaian, partai yang mengusung Sukandar/ /Syahlan satu ideologi agama (PKS ), dan empat ideologi Nasionalis (Hanura, Gerindra, PDI P dan Perindo) dan satu ideologi Agama (PKS), dan satu ideologi Agama Nasionalis (PAN). Sedangkan Hamdi/Harmain di dukung oleh dua partai Nasionalis ( Demokrat dan Nasdem), satu partai ideologi agama (PPP) dan dua partai ideologi Nasionalis agama (PBB dan PKB). Kedua kandidat tidak mementingkan kesamaan ideologi. Seharusnya pasangan Sukandar/Syarlan cukup didukung oleh empat partai yang sama ideologi partai yaitu PDI P, Hanura, Gerindra dan Perindo , karena sudah memenuhi syarat electoral treshold. Namun karena kurang rasa percaya diri mereka tambah satu partai ideologi agama (PKS) dan partai dengan ideologi agama Nasionalis (PAN). Akibatnya Sukandar dan Syahlan terjebak dalam koalisi gemuk demi memperkuat mesin partai.

Sementara Hamdi dan Harmain sudah cukup memenuhi elektoral treshold hanya dengan dua partai saja yaitu Demokrat plus Nasdem, namun karena kurang percaya diri dan agar mesin partai lebih banyak maka ditambah satu partai agama (PPP) dan dua partai agama Nasionalis (PBB dan PKB). Akibatnya mereka terjebak pada koalisi

gemuk dan tidak seragam lagi ideologinya. Sebenarnya Hamdi dan Harmain sudah cukup memenuhi elektoral treshold hanya dengan dua partai saja yaitu Demokrat plus Nasdem, namun karena kurang percaya diri dan agar mesin partai lebih banyak maka ditambah satu partai agama (PPP) dan dua partai agama Nasionalis (PBB dan PKB)

### C. Kabupaten Muara Jambi

Pemilu kada serentak 2017 di kabupaten Muara Jambi terdapat empat pasangan kandidat yang bertarung yaitu pasangan 1) Ivan Wiranata, ST/Dodi Sularso, 2) Agustian Mahir, SH./Suswiyanto, S.H, 3) Masnah Busro SE/Bambang Bayu Suseno, SP dan 4) Suhariyanto, SH. (dari jalur independen). Ivan Wiranata/Dodi Sularso. didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PPP. . Agustian Mahir, SH. /Suswiyanto, S.H. didukung oleh Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Hanura. Sementara Masnah Busro/Bambang Bayu Suseno diusung PAN, PKB, .Golkar, Nasdem dan PKS. Sementara pasangan Abunyani/Suhariyanto adalah non partai alias jalur independent. Jika dilihat dari ideologi kepartaian, partai yang mengusung Ivan Wiranata/ /Dodi Sularso dua partai Nasionalis (Golkar dan Gerindra) dan dua ideologi agama (PKS dan PPP). Jika ditinjau dari ideologi, pasangan Agustian Mahir/Suswiyanto didukung oleh tiga

ideologi Nasionalis (PDI Perjuangan, Partai Demokrat dan Partai Hanura.

Sedangkan pasangan Masnah Busro/Bambang Bayu Suseno didukung dari dua ideologi Nasionalis (Golkar dan Nasdem), dua ideologi agama Nasionalis (PAN dan PKB), serta ideologi agama (PKS). Seharusnya pasangan Ivan Wiranata/Dodi Sularso cukup dua partai Nasionalis yaitu Golkar dan Gerindra. Sedangkan Masnah Busro/Bambang Bayu Suseno cukup didukung partai dengan ideologi agama Nasionalis yang punya kesamaan ideologi yaitu PAN dan PKB. Namun untuk menambah mesin partai, mereka menambah Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PKS. Walaupun ideologi campur aduk yang penting menang terlebih dahulu. Sementara Seharusnya pasangan Agustian Mahir dan Suswiyanto didukung dengan tiga partai dengan ideologi yang sama yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, Gerindra dan Partai Demokrat. Nyatanya ideologi yang sama tidak jaminan dipilih, karena mesin partai jadi kurang.

Dari uraian diatas, untuk membuat penyederhanaan dan memudahkan dalam memaknai data dapat penulis buat matrik sebagai berikut :

No	Pasangan	Asal Kabupaten	Partai Pendukung	Ideologi
1.	Madel/Muharsyah	Sarolangun	1. PKS 2. Hanura 3. Demokrat	1. Agama 2. Nasionalis 3. Nasionalis
2.	Cik Endra/Hilalatil Badri	Sarolangun	1. PAN 2. PDI Perjuangan 3. Nasdem 4. PPP	1. Agama, Nasionalis 2. Nasionalis 3. Nasionalis 4. Agama
3.	Sukandar/Syahlan	Muaro Tebo	1. PKS 2. PAN 3. Hanura 4. Gerindra 5. PDI Perjuangan 6. Perindo	1. Agama 2. Agama, Nasionalis 3. Nasionalis 4. Nasionalis 5. Nasionalis 6. Nasionalis
4.	Hamdi/Harmain	Muaro Tebo	1. Demokrat 2. Nasdem 3. PPP 4. PBB 5. PKB	1. Nasionalis 2. Nasionalis 3. Agama 4. Agama, Nasionalis 5. Agama, nasionalis
5.	Ivan Wiranata/ Dodi Sularso	Muaro Jambi	1. PKS 2. PPP 3. Gerindra 4. Golkar	1. Agama 2. Agama 3. Nasionalis 4. Nasionalis
6.	Agustian Mahir/ Suswiyanto	Muaro Jambi	1. Demokrat 2. Hanura 3. PDI Perjuangan	1. Nasionalis 2. Nasionalis 3. Nasionalis
7.	Masnah Busro/ Bambang B. Suseno	Muaro Jambi	1. Golkar 2. PPP 3. Gerindra 4. PKS	1. Nasionalis 2. Agama 3. Nasionalis 4. Agama

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Penguatan ideologi merupakan suatu keniscayaan, karena makin maraknya pelaku politik dan pemilih yang pragmatis. Dengan adanya penguatan ideologi diharapkan pemecahan persoalan negara tidak dilakukan secara

spekulatif, tapi berdasarkan prinsip-prinsip (ideologi yang kuat). Disamping itu pemilih tidak bingung dalam menentukan pilihannya, karena masyarakat pemilih yang cerdas akan memilih partai yang mempunyai visi, misi dan program yang sesuai dengan keyakinan ideologi pemilih.



2. Tahapan pembangunan politik yang perlu disempurnakan yaitu pada fase kedua yaitu penyederhanaan kembali jumlah partai di Indonesia dan fase peningkatan kualitas kader serta pemilih.

### **B. Saran-Saran**

1. Untuk penguatan ideologi, harus dilandasi pendidikan agama dan pendidikan karakter bangsa yang lebih intensif dan meluas. Dengan demikian masyarakat memiliki integritas kepribadian dan memiliki prinsip-prinsip yang kokoh.
2. Penyederhanaan partai tidak melalui pembimbingan penguasa, tetapi serahkan/percayakan kepada komisioner dan atau tim pakar yang independent. Penyederhanaan yang direkomendasi adalah dua partai ideologi (Islam dan non Islam), satu Nasionalis, Nasionalis Islam, Nasionalis Non Islam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Firmansyah, 2008, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Obor, Jakarta
- Karim Navarin, 2011, *Matinya Ideologi dalam Domain Politik* (Opini di Jambi Ekspres)
- Karim, Navarin, 2014, *Kontemplasi Politik*, Danadyaksa, Yogyakarta
- Seliger, M. 1976, *Ideologi and Politic*, London, George Allen & Unwin
- Siagian, SP, 2005 *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta
- Rochchneider, R (2002), *Mobilizing versus chasing : how do parties target voters in election campaign?* Electoral studies 21 : 367-382